

The Church as a Prophetic Community in Political Space: Implementing the Toraja Church's Political Concept

Gereja sebagai Komunitas Profetis dalam Ruang Politik: Implementasi Konsep Politik Gereja Toraja

Annon Palulun,¹ Ester Agustini Tandana²
Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja Utara, Indonesia¹
Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan²
Email: annonpalulun@gmail.com¹

Received: 14 February 2023 / Accepted: 23 April 2024 / Published: 30 May 2024

How to cite this article:

Palulun, Annon, and Ester Agustini Tandana. "Gereja sebagai Komunitas Profetis dalam Ruang Politik: Implementasi Konsep Politik Gereja Toraja." *KINAA: Jurnal Teologi*, 9, no. 1 (2024): 38-52.
<https://doi.org/10.0302/c78bb742>.

Abstract

This article examines the Toraja Church's concept of church and politics in relation to political realities in North Toraja and its implications for the Lempo Batusangbua Congregation. This study employs a qualitative descriptive-analytical approach through library and field research. Data were collected through literature review, observation, and interviews with church elders and congregants, and analyzed to explore the relationship between theological concepts and political praxis within the congregation. The findings show that the Toraja Church theologically understands politics as part of the vocation of faith and a sphere of ministry to promote justice, solidarity, and God's peace; however, its implementation remains limited due to pietistic legacies, inadequate political education, political pragmatism, and the underdeveloped prophetic role of the church. This study argues that the church should be understood as a prophetic community in political space through political education, prophetic witness, public ethics formation, and responsible civic participation. The contribution of this study lies in connecting the theological concept of the Toraja Church with local political praxis as a model for ecclesial engagement in socio-political life in Indonesia.

Keywords: Toraja Church; political theology; prophetic community; political participation; public ethics.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep Gereja Toraja mengenai gereja dan politik dalam perjumpaannya dengan fenomena politik di Toraja Utara serta implikasinya bagi Jemaat Lempo Batusangbua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan majelis serta anggota jemaat, kemudian dianalisis untuk melihat relasi antara konsep teologis dan praksis politik warga gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teologis Gereja Toraja memandang politik sebagai bagian dari panggilan iman dan medan pelayanan untuk menghadirkan keadilan, solidaritas, dan damai sejahtera Allah, namun implementasinya belum optimal karena dipengaruhi warisan pietistik, rendahnya pendidikan politik gerejawi, pragmatisme politik warga, dan belum maksimalnya fungsi profetis gereja. Penelitian ini menegaskan gereja sebagai komunitas profetis dalam ruang politik yang dipanggil menjalankan pendidikan politik gerejawi, memperkuat fungsi kenabian, membangun etika publik, dan mendampingi partisipasi politik warga secara bertanggung jawab. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep teologis Gereja Toraja dengan praksis politik lokal sebagai model keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia.

Kata Kunci: Gereja Toraja; teologi politik; komunitas profetis; partisipasi politik; etika publik.

PENDAHULUAN

Relasi gereja dan politik merupakan salah satu tema penting dalam teologi publik yang terus relevan untuk didiskusikan. Persoalan ini tidak pernah kehilangan aktualitas, sebab gereja hidup dan menjalankan panggilannya di tengah struktur sosial-politik yang terus berubah. Dalam kehidupan bersama, politik bukan sekadar urusan perebutan kekuasaan, melainkan medan pengelolaan hidup bersama demi kesejahteraan umum (*bonum commune*). Miriam Budiardjo menegaskan bahwa hakikat politik berkaitan dengan usaha mengatur kehidupan bersama agar tujuan bersama dapat diwujudkan secara tertib dan adil.¹

Dalam perspektif ini, gereja tidak dapat melepaskan diri dari realitas politik. Sebagai komunitas iman yang hidup di tengah masyarakat, gereja berada dalam pusaran dinamika sosial yang dibentuk oleh kebijakan, hukum, dan kekuasaan politik. Aristoteles bahkan memahami manusia sebagai *zoon politikon*, makhluk yang secara kodrati hidup dalam ruang politik.² Artinya, setiap orang, termasuk warga gereja, pada dasarnya merupakan subjek politik yang bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Namun demikian, di kalangan warga gereja masih berkembang pandangan bahwa politik adalah wilayah “sekuler” yang berada di luar panggilan gereja. Politik sering dipersepsi sebagai arena kotor, sarat manipulasi, dan bertentangan dengan kehidupan iman. Pandangan ini, sebagaimana dikritik Saut Sirait, lahir dari pemahaman dualistis yang memisahkan iman dari tanggung jawab sosial-politik.³ Akibatnya, gereja sering bersikap apatis terhadap persoalan publik, padahal kesaksian Kristen justru menuntut keterlibatan dalam transformasi sosial.

Dalam terang iman Kristen, politik dapat dipahami sebagai salah satu medan pelayanan gereja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, terutama keadilan, perdamaian, dan pembelaan terhadap martabat manusia. Frans Magnis-Suseno menegaskan bahwa iman Kristen memiliki dimensi politis karena iman selalu berkaitan dengan perjuangan terhadap keadilan dan kemanusiaan.⁴ Oleh sebab itu, keterlibatan gereja dalam politik bukan penyimpangan dari panggilannya, melainkan konsekuensi dari iman yang dihayati secara sosial.

Dalam kerangka itu, gereja terpanggil menjalankan fungsi profetisnya, yakni menghadirkan kritik moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan, membela mereka yang tertindas, dan membentuk kesadaran politik umat. Donald Jay Loshier menunjukkan bahwa

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 15–17.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 54; bdk. Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 23.

³ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 31–34.

⁴ Frans Magnis-Suseno, “Iman dan Politik,” dalam *Keprihatinan Sosial Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 96–101.

model relasi gereja dan negara yang paling konstruktif bukanlah pemisahan mutlak ataupun asimilasi, melainkan interaksi kritis yang memungkinkan gereja tetap independen sekaligus berperan transformatif di tengah masyarakat.⁵ Dengan demikian, gereja tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi juga pelaku etis dalam ruang publik.

Lebih jauh, politik tidak dapat dipahami semata sebagai arena yang penuh dosa sehingga harus dihindari. Dalam tradisi Reformasi, politik bahkan dipahami sebagai *theatrum gloriae Dei*—panggung kemuliaan Allah—tempat kehendak Allah tentang keadilan dan damai diperjuangkan dalam sejarah.⁶ Karena itu, keterlibatan gereja dalam politik harus dipahami sebagai bagian dari misi Allah di dunia.

Dalam konteks Indonesia, termasuk di lingkungan Gereja Toraja, panggilan ini menjadi semakin penting. Gereja tidak cukup hanya memberi tuntunan moral secara umum, tetapi perlu membina warga jemaat memahami politik sebagai bidang pelayanan dan tanggung jawab iman. Yeremia 29:7 menegaskan panggilan umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka hidup, sedangkan Roma 13:1–7 menunjukkan relasi iman dengan tanggung jawab terhadap tata kehidupan publik. Dalam perspektif ini, partisipasi politik warga gereja merupakan bagian dari kesaksian iman di ruang publik. Martin L. Sinaga menunjukkan bahwa pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia justru menemukan relevansinya ketika gereja hadir secara dialogis dan transformatif dalam ruang kebangsaan.⁷

Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa keterlibatan politik warga Gereja Toraja masih sering diwarnai sikap skeptis, pragmatisme, bahkan minimnya pendidikan politik gerejawi. Warisan pietisme yang cenderung memisahkan gereja dari urusan politik masih memberi pengaruh, sehingga politik dipandang sekadar urusan kekuasaan, bukan panggilan etis. Daud NOMPI mencatat bahwa salah satu tantangan Gereja Toraja pasca-reformasi ialah belum optimalnya pendewasaan politik warga gereja sebagai bagian dari tanggung jawab gerejawi.⁸

Padahal gereja dipanggil bukan hanya memberi panduan etis, tetapi juga menghadirkan kader-kader politik yang menghidupi nilai-nilai Kristiani di tengah sistem demokrasi. Politik dalam perspektif Kristiani bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana

⁵ Donald Jay Loshier, “Gereja dan Negara: Tipe-Tipe Sikap dalam Gereja,” dalam Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (eds.), *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 42–48.

⁶ G.C. van Niftrik dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 438–441.

⁷ Martin L. Sinaga, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001).

⁸ Daud NOMPI, “Gereja dan Politik: Suatu Tinjauan Teologis terhadap Peran Politik Gereja Toraja Pasca Reformasi” (Makassar: STT Intim, 2010), 1-2.

memperjuangkan kesejahteraan bersama, membela yang lemah, serta menghadirkan damai sejahtera Allah (*shalom*) dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji konsep Gereja Toraja mengenai gereja dan politik dalam perjumpaannya dengan fenomena politik di Toraja Utara serta implikasinya bagi Jemaat Lempo Batusangbua. Kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa politik bukan wilayah asing bagi gereja, melainkan salah satu ruang aktualisasi iman dan pelayanan gereja di tengah dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep Gereja Toraja mengenai gereja dan politik, sekaligus menganalisis implementasinya dalam fenomena politik di Toraja Utara. Kajian pustaka dilakukan melalui penelusuran buku-buku teologi, etika politik, dokumen gerejawi, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan guna membangun kerangka konseptual penelitian.⁹ Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap majelis serta anggota Jemaat Lempo Batusangbua untuk memperoleh data empiris mengenai pemahaman dan praktik politik warga gereja. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data sesuai fokus penelitian.¹⁰

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola hubungan antara konsep teologis gereja dan praksis politik warga jemaat.¹¹ Melalui metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai konsep politik Gereja Toraja, tetapi juga memberikan refleksi teologis yang konstruktif mengenai keterlibatan gereja dalam politik sebagai medan pelayanan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan bersama, dan damai sejahtera Allah.

⁹ Yusak Tanasyah, Sutrisno, and Bobby Kurnia Putrawan, *Metode Penelitian Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, 2021); Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 21–25; Daud NOMPI, *Gereja dan Politik* (Makassar: STT Intim, 2010), 18–28.

¹⁰ Yusak Tanasyah, Sutrisno, and Bobby Kurnia Putrawan, *Metode Penelitian Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*.

¹¹ Daud NOMPI, *Gereja dan Politik*, 3-5.

HASIL:

Konsep politik Gereja Toraja dalam implementasinya masih menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas teologis dan praksis di lapangan. Secara konseptual, Gereja Toraja memahami politik sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan medan pelayanan untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah seperti keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan warga jemaat. Pengaruh warisan pietisme yang memandang politik sebagai sesuatu yang kotor dan jauh dari kehidupan rohani masih cukup kuat, sehingga partisipasi politik warga gereja sering diwarnai sikap skeptis bahkan apatis.¹²

Selain itu, ditemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan konsep politik Gereja Toraja belum terimplementasi secara maksimal ialah minimnya pendidikan politik gerejawi. Politik masih kerap dipahami secara sempit sebatas perebutan kekuasaan atau keterlibatan dalam pemilu, bukan sebagai tanggung jawab etis untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Akibatnya, banyak warga gereja belum memaknai dirinya sebagai subjek politik yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menyebabkan gereja belum optimal menjadi basis pembinaan kesadaran politik warga secara kritis dan transformatif.¹³

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis di kalangan warga jemaat dalam menghadapi dinamika politik lokal. Dalam beberapa kontestasi politik, sebagian warga gereja rentan terhadap praktik politik transaksional, termasuk pengaruh *money politics* yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa warga gereja kerap diposisikan sebagai objek mobilisasi politik, bukan pelaku politik yang sadar dan kritis. Dalam situasi demikian, nilai-nilai etis dan tanggung jawab moral dalam berpolitik kerap terpinggirkan oleh kepentingan sesaat.¹⁴ Temuan ini sejalan dengan Mary Kinoti yang menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dalam politik rentan kehilangan orientasi profetis ketika dikooptasi kepentingan transaksional.¹⁵

Ada pemahaman dari salah satu anggota dan majelis gereja Jemaat Lempo Batusangbua bahwa politik itu bukan urusan gereja melainkan urusan ke pemerintahan. Gereja sama sekali tidak boleh ikut campur dalam urusan politik karena gereja hanya menyangkut soal kebaktian

¹² Daud NOMPI, *Gereja dan Politik: Suatu Tinjauan Teologis terhadap Peran Politik Gereja Toraja Pasca Reformasi*, 4-7.

¹³ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, 87-92.

¹⁴ Markus Parura dan Singgi', Wawancara di Lempo Dusun Kokoa, 2023; Samuel P., Wawancara di Lempo Ta'ba', 2023.

¹⁵ Mary Kinoti. "Church and politics: The conflict of Interests". *Global Scientific Journals* 9, no.7 (2021): 1519-1523.

dan menganggap politik itu kotor.¹⁶ Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab peran politik Gereja Toraja belum maksimal oleh kurangnya pendidikan politik terhadap warga Gereja sekaligus warga masyarakat, sehingga pandangan yang berkembang di kalangan warga gereja dan masyarakat bahwa politik hanya bersangkut paut pada upaya merebut dan menggunakan kekuasaan untuk merebut kedudukan, bahkan pandangan warga gereja hanya sebatas memberikan pilihan politik pada saat pemilu.¹⁷

Pada sisi ini, peneliti menemukan bahwa peran profetis Gereja Toraja dalam relasinya dengan pemerintah belum dijalankan secara maksimal. Relasi gereja dan pemerintah lebih banyak diwujudkan dalam pola dukungan moral dan doa, sementara fungsi korektif dan kritis terhadap kebijakan publik belum terumuskan secara strategis. Konsep “menegur dalam kasih” yang hidup dalam tradisi Gereja Toraja belum selalu diterjemahkan dalam tindakan profetis yang tegas terhadap praktik kekuasaan yang tidak adil. Hal ini menyebabkan kehadiran gereja dalam ruang politik terkadang terkesan akomodatif dan kurang menunjukkan daya transformasinya.¹⁸

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran bahwa politik sesungguhnya dapat dipahami sebagai anugerah Allah dan sarana pelayanan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dalam pemahaman ini, keterlibatan politik gereja tidak dimaksudkan untuk mengejar kekuasaan, tetapi menjadi wujud tanggung jawab iman dalam memperjuangkan martabat manusia, solidaritas sosial, dan kesejahteraan bersama. Kesadaran ini menjadi dasar penting bagi Gereja Toraja untuk mengembangkan pendidikan politik warga, memperkuat fungsi profetis gereja, dan membangun partisipasi politik yang berakar dalam iman Kristen.¹⁹

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama Gereja Toraja bukan terletak pada absennya konsep teologis mengenai politik, melainkan pada belum optimalnya implementasi konsep tersebut dalam praksis bergereja. Karena itu diperlukan upaya pendewasaan politik warga gereja melalui pembinaan, pendidikan politik yang berkelanjutan, dan penguatan peran gereja sebagai komunitas profetis di tengah masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan gereja dalam politik tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi

¹⁶ Markus Parura and Singgi', Wawancara di Lempo dusun Kokoa, 2023; Wawancara dengan P. Samuel, Lempo Batusangbua, 2023.

¹⁷ Samuel P., Wawancara di Lempo Ta'ba', 2023.

¹⁸ Donald Jay Loshier, "Gereja dan Negara: Tipe-Tipe Sikap dalam Gereja," dalam *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 42–48.

¹⁹ Frans Magnis-Suseno, "Iman dan Politik," dalam *Keprihatinan Sosial Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 96–103.

sebenarnya menjadi praksis iman yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam kehidupan publik.²⁰

PEMBAHASAN

Gereja sebagai Komunitas Profetis dalam Ruang Politik

Gereja pada hakikatnya merupakan komunitas iman yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan publik. Karena itu, keterlibatan gereja dalam politik tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari identitas gereja, melainkan bagian dari panggilan gereja di tengah dunia. B. J. Boland menegaskan bahwa iman Kristen selalu memiliki konsekuensi sosial karena Injil berbicara tentang manusia dalam keseluruhan relasinya dengan Allah, sesama, dan dunia.²¹ Dalam kerangka ini, politik dipahami bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, tetapi ruang etis untuk mengusahakan kehidupan bersama yang adil. Oleh sebab itu, kehadiran gereja dalam ruang politik merupakan bentuk kesaksian iman yang diwujudkan dalam tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum.

Namun dalam praktiknya, konsep politik Gereja Toraja masih sering diwarnai sikap skeptis yang membuat keterlibatan gereja dalam politik belum berkembang secara optimal. Warisan teologi pietistik yang memisahkan urusan rohani dari urusan sosial-politik turut membentuk pandangan bahwa politik identik dengan kekotoran dan tipu muslihat. Daud NOMPI mencatat bahwa warisan pemahaman ini masih memengaruhi banyak warga Gereja Toraja dalam memandang politik secara negatif.²² Akibatnya, tidak sedikit warga gereja bersikap apatis terhadap proses demokrasi dan menganggap partisipasi politik tidak berkaitan dengan panggilan iman. Situasi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi teologis agar politik dipahami sebagai medan pelayanan, bukan ancaman bagi spiritualitas Kristen.

Kurangnya pendidikan politik di kalangan warga gereja juga memperkuat persepsi sempit mengenai politik sebagai sekadar perebutan jabatan dan kekuasaan. Saut Sirait menegaskan bahwa partisipasi politik Kristen harus berakar pada kesadaran etis, bukan sekadar keterlibatan prosedural dalam pemilu.²³ Dalam perspektif ini, gereja memiliki tanggung jawab membina warga agar memahami politik sebagai upaya memperjuangkan kebaikan bersama. Tanpa pembinaan semacam itu, warga gereja mudah jatuh dalam

²⁰ Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 132–137.

²¹ B. J. Boland, *Inti Sari Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), 57.

²² Daud NOMPI, “Gereja dan Politik: Suatu Tinjauan Teologis terhadap Peran Politik Gereja Toraja Pasca Reformasi” (Skripsi, STT Intim Makassar, 2010), 72–79.

²³ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 112–118.

pragmatisme politik dan sulit membangun sikap kritis terhadap kekuasaan. Karena itu, gereja perlu berfungsi sebagai basis pendidikan politik yang membentuk tanggung jawab sosial umat.

Fenomena politik transaksional yang ditemukan dalam konteks lokal Toraja Utara memperlihatkan betapa rentannya warga jemaat menjadi objek mobilisasi kekuasaan. Praktik *money politics* dan patronase politik sering menempatkan warga gereja sebagai komoditas politik yang diperebutkan elite. Dalam perspektif Aristoteles, manusia sebagai *zoon politikon* justru dipanggil mengambil bagian aktif dalam menentukan arah kehidupan bersama, bukan sekadar menjadi objek manipulasi.²⁴ Ketika kesadaran ini lemah, politik kehilangan dimensi etisnya dan berubah menjadi transaksi kepentingan. Karena itu gereja dipanggil memulihkan kesadaran politik warga sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam demokrasi. Hal ini juga dipertegas oleh studi kontemporer Szczerbiak/Yang tentang kontribusi komunitas religius terhadap budaya demokrasi dan partisipasi warga.²⁵

Dalam konteks tersebut, fungsi profetis gereja menjadi sangat penting. Alter I. Wowor menekankan bahwa etika politik gereja harus diwujudkan melalui keberanian kritis, kreativitas sosial, dan realisme moral dalam menghadapi kekuasaan.²⁶ Sarkodie-Addo menegaskan fungsi profetis gereja bukan hanya korektif, tetapi juga membentuk etika publik dan transformasi sosial.²⁷ Ini berarti gereja tidak cukup hanya mendoakan pemerintah, tetapi juga harus mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan dan membela keadilan. Prinsip “menegur dalam kasih” tidak dapat direduksi menjadi sikap pasif, melainkan harus dipahami sebagai ekspresi kenabian yang bertanggung jawab. Di sinilah gereja tampil sebagai komunitas profetis yang menghadirkan suara moral di tengah kehidupan publik.

Relasi gereja dan negara karena itu perlu ditempatkan dalam hubungan dialogis-kritis, bukan subordinatif ataupun antagonistik. Donald Jay Losher menunjukkan bahwa model interaksi kritis memungkinkan gereja berpartisipasi dalam transformasi sosial tanpa kehilangan independensi profetisnya.²⁸ Gereja dapat bekerja sama dengan negara demi

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 54–56.

²⁵ Aleks Szczerbiak, “Still a Key Political Actor? The Catholic Church and Politics in Post-1989 Poland.” *Europe-Asia Studies* 77, no. 6 (2025): 873-894; Minju Yang, “To Speak or Stay Silent: The Church’s Role in a Polarized Political World”. *Pillars at Taylor University*, 2025, 1-6.

²⁶ Alter I. Wowor, “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern” (Manado: Institut Agama Kristen Negeri Manado, 2023).

²⁷ Samuel Sarkodie-Addo, and John Kwaku Opoku. “Church and Politics: An Assessment of the Bases and Approach of the Church’s Political Engagement in Ghana,” *E-Journal of Religious and Theological Studies*, 9 no.7 (2023): 318-337.

²⁸ Donald Jay Losher, “Gereja dan Negara: Tipe-Tipe Sikap dalam Gereja,” in Weinata Sairin and J. M. Pattiasina, eds., *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, 42–48.

kesejahteraan bersama, tetapi tetap menjaga kebebasan moral untuk mengkritik ketika kekuasaan menyimpang. Perspektif ini penting bagi Gereja Toraja agar relasi dengan pemerintah tidak berhenti pada akomodasi, melainkan bergerak menuju peran transformatif.²⁹ Dengan demikian, gereja hadir bukan sebagai legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai suara kenabian yang mengarahkan politik kepada keadilan.

Dasar terdalam keterlibatan gereja dalam politik sesungguhnya berakar pada inti pewartaan Kristiani tentang pembebasan. Frans Magnis-Suseno menegaskan bahwa iman Kristen memiliki dimensi politik karena selalu terkait dengan perjuangan melawan ketidakadilan dan pembelaan terhadap martabat manusia.³⁰ Karya pembebasan Kristus bukan hanya menyangkut keselamatan spiritual, tetapi pemulihan relasi manusia dalam sejarah. Karena itu, gereja dipanggil menghayati pembebasan ini melalui keterlibatan sosial-politik yang berpihak kepada yang lemah. Politik dalam perspektif ini menjadi praksis iman, bukan sekadar strategi kekuasaan. Perspektif ini sejalan dengan Gunche Lugo yang menempatkan praksis politik Yesus sebagai tindakan pembebasan yang menghadirkan keadilan sosial melalui pelayanan, bukan dominasi.³¹

Dalam kerangka tersebut, politik dapat dipahami sebagai medan pelayanan dan bahkan anugerah Allah untuk mengusahakan damai sejahtera bersama. Nuban Timo dan Ebenhaizer menegaskan bahwa bergereja di bumi Pancasila menuntut gereja menghadirkan Injil secara kontekstual dalam kehidupan berbangsa.³² Ini berarti politik tidak boleh dipandang sebagai wilayah asing bagi gereja, tetapi bagian dari kesaksian iman di ruang publik. Keterlibatan warga gereja dalam politik karena itu harus diarahkan pada solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, politik Kristen adalah politik pelayanan, bukan politik dominasi.

Pemahaman tersebut berkaitan erat dengan hakikat gereja sebagai *ekklesia*, yaitu komunitas yang dipanggil keluar dan diutus kembali ke dalam dunia. Harun Hadiwijono menjelaskan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil menjadi saksi Allah di tengah dunia.³³ Karena itu, gereja tidak boleh dipahami hanya sebagai institusi

²⁹ Oey Natanael Winanto, Johnnie Manopo, and Iswahyudi Iswahyudi. "Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat: Etika Kristen Pada Ketaatan Dan Tanggung Jawab: The Relationship Between Church, State, and Society: Christian Ethics on Obedience and Responsibility". *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 1-25. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.108>.

³⁰ Frans Magnis-Suseno, "Iman dan Politik", 37.

³¹ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: Andi, 2006).

³² Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil di Bumi Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 88-97.

³³ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 362.

liturgis, tetapi sebagai komunitas misioner yang hidup bagi dunia. Perspektif ini dipertegas Widi Artanto yang melihat gereja sebagai tanda dan sarana Kerajaan Allah dalam sejarah.³⁴ Maka keterlibatan gereja dalam politik bukan tambahan eksternal, melainkan konsekuensi dari identitas eklesiologis gereja sendiri. Gagasan ini sejalan dengan rumusan klasik DGI *Disuruh ke Dalam* yang menegaskan gereja dipanggil hadir dan bekerja di tengah pergumulan dunia.³⁵

Dalam hubungan ini, misi gereja berkaitan erat dengan pembentukan etika publik warga. Paulus S. Widjaja menegaskan bahwa partisipasi politik Kristen tidak cukup berhenti pada moralitas pribadi, tetapi harus bergerak menuju tanggung jawab publik yang transformatif.³⁶ Gereja karena itu dipanggil membentuk warga yang matang secara politik, kritis terhadap ketidakadilan, dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Pembentukan etika publik ini menjadi penting agar warga jemaat tidak mudah terseret pragmatisme atau instrumentalisasi politik. Melalui proses ini, gereja menjalankan perannya sebagai komunitas pembentuk budaya politik yang sehat.

Kontribusi gereja terhadap ruang publik juga tampak dalam kemampuannya membangun solidaritas sosial dan modal moral masyarakat. Anna Greenberg menunjukkan bahwa gereja dapat merevitalisasi politik dan komunitas melalui pembentukan etika publik serta solidaritas warga.³⁷ Perspektif ini menolong melihat politik bukan semata arena konflik, tetapi juga ruang pembentukan kehidupan bersama yang demokratis. Dalam konteks Gereja Toraja, hal ini berarti gereja dapat berperan konstruktif dalam membangun budaya politik yang adil dan partisipatif. Kehadiran gereja di ruang politik dengan demikian bersifat korektif sekaligus konstruktif.

Gereja sebagai komunitas profetis dalam ruang politik menunjuk pada gereja yang mengintegrasikan iman, misi, dan tanggung jawab publik secara utuh. Tantangan Gereja Toraja bukan terutama absennya dasar teologis mengenai politik, melainkan transformasi konsep itu menjadi praksis melalui pendidikan politik, fungsi profetis, solidaritas sosial, dan pembentukan etika publik.³⁸ G. C. van Niftrik dan B. J. Boland mengingatkan bahwa gereja kehilangan suara kenabiannya ketika terlalu dekat dengan kekuasaan dan kehilangan daya

³⁴ Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia*, 60.

³⁵ Notulen Sidang Raya DGI. "Ceramah-Ceramah Sidang Raya DGI Ke-VII, Disuruh Ke Dalam," 1971.

³⁶ Paulus S. Widjaja, "Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia," *Gema Teologika* 38, no. 2 (2014): 171–184.

³⁷ Anna Greenberg, "The Church and the Revitalization of Politics and Community," *Political Science Quarterly* 115, no. 3 (2000): 381–388.

³⁸ Antonius Missa, "Teologi Misi Holistik: Suatu Diskusi Perspektif Alkitabiah". *Indonesian Journal of Religious* 5, no. 1 (2022):17-34.

kritik.³⁹ Karena itu gereja dipanggil hadir dalam politik secara kritis, profetis, dan transformatif sebagai garam dan terang dunia. Pada titik inilah gereja sungguh menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah kehidupan bersama.

Implementasi Konsep Gereja Toraja tentang Gereja dan Politik bagi Jemaat Lempo Batusangbua

Pada bagian implementasi ini menjelaskan bagaimana konsep teologis Gereja Toraja tentang politik diwujudkan secara konkret dalam kehidupan jemaat. Implementasi pertama terletak pada pendidikan politik gerejawi sebagai bentuk pendewasaan warga jemaat. Gereja Toraja, khususnya Jemaat Lempo Batusangbua, perlu mengembangkan pembinaan yang menolong warga memahami politik sebagai panggilan etis dan medan pelayanan, bukan sekadar urusan perebutan kekuasaan. Pendidikan ini dapat diwujudkan melalui katekisasi sosial-politik, pembinaan warga jemaat, seminar etika politik, maupun pengajaran gerejawi yang mengintegrasikan iman dan tanggung jawab kewargaan. Sebagaimana dikemukakan Saut Sirait, partisipasi politik Kristen harus bertolak dari kesadaran etis dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.⁴⁰

Implementasi kedua adalah penguatan peran profetis gereja dalam kehidupan publik. Konsep “menegur dalam kasih” perlu diwujudkan bukan hanya secara normatif, tetapi dalam tindakan pastoral-profetis yang konkret,⁴¹ misalnya sikap kritis terhadap politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan sosial, serta keberpihakan kepada kelompok rentan. Dalam hal ini gereja tidak berpolitik praktis partisan, tetapi menjalankan politik moral dan politik kenabian. Donald Jay Losher menyebut model ini sebagai interaksi kritis antara gereja dan negara yang memungkinkan gereja tetap independen namun transformatif.⁴²

Implementasi ketiga ialah pendampingan warga jemaat dalam partisipasi politik yang bertanggung jawab. Gereja tidak cukup hanya memberi nasihat moral menjelang pemilu, tetapi mendampingi warga membangun kesadaran politik kritis, termasuk dalam memilih pemimpin, menolak politik transaksional, dan menghidupi politik sebagai pelayanan. Pendampingan ini juga penting bagi warga jemaat yang terlibat langsung dalam lembaga legislatif maupun eksekutif agar kehadiran mereka sungguh menjadi kesaksian iman di ruang publik. Paulus S.

³⁹ G. C. van Niftrik and B. J. Boland, *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 57, 360-361.

⁴⁰ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 112–118.

⁴¹ Yan Suhendra, and Susanti Embong Bulan. “Kasih Allah akan Dunia ini: Panggilan Umat Kristen untuk Mengasihi Indonesia (God’s Love for this World: Christians Call to Love Indonesia)”. *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 3, no. 1 (2021): 51-71.

⁴² Donald Jay Losher, “Gereja dan Negara: Tipe-Tipe Sikap dalam Gereja”, 45–48.

Widjaja menegaskan bahwa partisipasi politik Kristen harus bergerak dari sekadar keterlibatan menuju transformasi sosial.⁴³

Implementasi keempat ialah pemberdayaan gereja sebagai basis pembentukan etika publik. Jemaat Lempo Batusangbua dapat menjadi ruang pembentukan budaya politik yang sehat melalui penguatan nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini gereja bukan hanya merespons persoalan politik, tetapi membentuk habitus politik warga yang selaras dengan nilai Kerajaan Allah. Artanto melihat misi gereja selalu berkaitan dengan transformasi kehidupan, termasuk struktur sosial yang menopang kehidupan bersama.⁴⁴ Seta juga melihat misi gereja sebagai keterlibatan aktif dalam transformasi sosial, termasuk struktur politik yang memengaruhi kehidupan manusia.⁴⁵

Implementasi konsep Gereja Toraja mengenai gereja dan politik tidak berhenti pada wacana teologis, tetapi terwujud dalam pendidikan politik, fungsi profetis, pendampingan partisipasi warga, dan pembentukan etika publik di tingkat jemaat. Di sinilah implikasi penelitian ini bagi Jemaat Lempo Batusangbua menjadi nyata: gereja dipanggil bukan hanya memahami politik secara teologis, tetapi menghidupinya sebagai praksis iman demi menghadirkan damai sejahtera Allah dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Gereja Toraja tentang gereja dan politik pada dasarnya menempatkan politik sebagai bagian dari panggilan iman dan medan pelayanan untuk menghadirkan keadilan, damai sejahtera, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Namun implementasi konsep tersebut di Jemaat Lempo Batusangbua belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh warisan teologis yang cenderung memisahkan iman dan politik, minimnya pendidikan politik gerejawi, kecenderungan pragmatis dalam partisipasi politik warga, serta belum maksimalnya fungsi profetis gereja dalam relasinya dengan negara. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar teologis Gereja Toraja mengenai politik, melainkan pada belum terwujudnya transformasi konsep tersebut dalam praksis bergereja yang konkret di ruang publik.

Penelitian ini berkontribusi secara teologis dan praktis dengan menegaskan kembali gereja sebagai komunitas profetis dalam ruang politik, sekaligus menawarkan pemahaman bahwa politik dapat dilihat sebagai medan pelayanan dan penghayatan iman, bukan semata

⁴³ Paulus S. Widjaja, "Partisipasi Kristiani Dalam Politik di Indonesia": 179–184.

⁴⁴ Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 146–161.

⁴⁵ "Misi Gereja Masa Kini," 2023. <https://webmastersabda.id>.

arena kekuasaan. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan arah implementasi melalui pendidikan politik gerejawi, penguatan fungsi kenabian gereja, pendampingan partisipasi politik warga, dan pembentukan etika publik di tingkat jemaat. Kontribusi penelitian ini juga terletak pada upaya menghubungkan konsep teologis Gereja Toraja dengan praksis politik lokal Jemaat Lempo Batusangbua, sehingga memberi sumbangan bagi pengembangan kajian gereja dan politik, khususnya dalam konteks gereja-gereja di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi tentang relasi gereja dan politik, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dan praksis bagi penguatan peran gereja dalam kehidupan sosial-politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanto, Widi. *Menjadi Gereja Misioner dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Boland, B. J. *Inti Sari Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Greenberg, Anna. "The Church and the Revitalization of Politics and Community." *Political Science Quarterly* 115, no. 3 (2000): 377–94. <https://doi.org/10.2307/2658124>.
- Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Helweldery, Ronald. "Gereja dalam Konteks Politik." Manado: Institut Agama Kristen Negeri Manado, 2023.
- Kinoti, Mary. "Church and Politics: The Conflict of Interests." *Global Scientific Journals* 9, no. 7 (2021): 1519–23. https://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/Church_and_politics_The_conflict_of_Interests.pdf.
- Losher, Donald Jay. "Gereja dan Negara: Tipe-Tipe Sikap dalam Gereja." In *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, edited by Weinata Sairin and J. M. Pattiasina. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Lugo, Gunche. *Manifesto Politik Yesus*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Missa, Antonius. "Teologi Misi Holistik: Suatu Diskusi Perspektif Alkitabiah". *Indonesian Journal of Religious* 5, no. 1 (2022):17-34. <https://doi.org/10.46362/ijr.v5i1.8>.
- Nehemia, Sandi, and Andri. Wawancara dengan anggota PPGT di Jemaat Lempo Batusangbua, 2023.
- Niftrik, G. C. van, and B. J. Boland. *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia,

- 2015.
- Nompi, Daud. “Gereja dan Politik: Suatu Tinjauan Teologis terhadap Peran Politik Gereja Toraja Pasca Reformasi.” Skripsi, STT Intim Makassar, 2010.
- Notulen Sidang Raya DGI. *Ceramah-Ceramah Sidang Raya DGI ke-VII: Disuruh ke Dalam*. 1971.
- P., Samuel. Wawancara di Lempo Ta’ba’, 2023.
- Parura, Markus, and Singgi’. Wawancara di Lempo Dusun Kokoa, 2023.
- Pelayananpublik.id. “Arti Politik, Tujuan, Manfaat hingga Jenisnya.” 2023.
<https://pelayananpublik.id>.
- Sarkodie-Addo, Samuel, and John Kwaku Opoku. “Church and Politics: An Assessment of the Bases and Approach of the Church’s Political Engagement in Ghana.” *E-Journal of Religious and Theological Studies* 9, no. 7 (2023): 318–37.
<https://doi.org/10.38159/erats.2023977>.
- Seta, Ignatius Bagoes. “Misi Gereja Masa Kini.” 2023. <https://webmastersabda.id>.
- Sinaga, Martin L. *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Sirait, Saut. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Šola, Ivica, and Nikola Bižaca. “Catholic Involvement in Politics: Some Theological and Anthropological Considerations.” *Religions* 16, no. 4 (2025): 485.
<https://doi.org/10.3390/rel16040485>.
- Suhendra, Yan, and Susanti Embong Bulan. “Kasih Allah akan Dunia ini: Panggilan Umat Kristen untuk Mengasihi Indonesia (God’s Love for this World: Christians Call to Love Indonesia)”. *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 3, no. 1 (2021): 51-71. <https://doi.org/10.46362/quaerens.v3i1.34>.
- Suseno, Frans Magnis. “Iman dan Politik.” In *Keprihatinan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Szczerbiak, Aleks. “Still a Key Political Actor? The Catholic Church and Politics in Post-1989 Poland.” *Europe-Asia Studies* 77, no. 6 (2025): 873–94.
<https://doi.org/10.1080/09668136.2025.2523025>.
- Timo, Nuban, and Ebenhaizer I. *Meng-Hari-Ini-Kan Injil di Bumi Pancasila: Bergereja dengan Cita Rasa Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Widjaja, Paulus S. “Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita,

dan Politik Yesus.” *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 38, no. 2 (2014).

Winanto, Oey Natanael, Johnnie Manopo, and Iswahyudi Iswahyudi. “Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat: Etika Kristen Pada Ketaatan Dan Tanggung Jawab: The Relationship Between Church, State, and Society: Christian Ethics on Obedience and Responsibility”. *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 1-25.
<https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.108>.

Wowor, Alter I. “Teologi dan Etika Politik dalam Gereja di Zaman Post-Modern.” Manado: Institut Agama Kristen Negeri Manado, 2023.

Yang, Minju. “To Speak or Stay Silent: The Church’s Role in a Polarized Political World.” *Pillars at Taylor University* (2025): 1–6.
<https://pillars.taylor.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=politicalstudies>.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.